

## DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, Restu. 2012. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Dengan Dimoderasi Oleh Variable Desentralisasi Dan Budaya Organisasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Ekonomi*. 20(3): 1-15.
- Alshbiel, Seif Obeid dan Al-Awaqleh, Qasim Ahmad. 2011. Factors Affecting the Applicability of the Computerized Accounting System. *International Research Journal of Finance and Economics*, Issue 64: 37-53.
- Annisa, Vivid. 2017. Pengaruh System Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pecan Baru).
- Dewi, Mertayani Sari Dan Nyoman Ari Surya D, Desak Nyoman Sri Werastuti. 2015. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangli).
- E- Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 3 No. 1.
- Fitriyani, Yuli, Radna Nurmalina dan Rina Febriana. 2015. Pelatihan pencatatan dan pelaporan keuangan desa di desa sambangan kecamatan BTI-BATI.
- Hendra, Juni. 2018. Pengaruh partisipasi dalam penganggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal ilmiah ilmu akuntansi, keuangan dan pajak*, 2(1): 8-17.
- Indah, Suci Hanifah. 2015. Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 4(8): 1-15.
- Jurnal Akuntansi Politehnik Tanah Laut, Pp. 54-60.
- Jurnal Akuntansi Universitas Pendidikan Genesha, 3(1): 1-11.
- Jurnal bisnis dan manajmen. 3(1): 1-16. Coralie, Byant and White Louise, 1987. Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang, Terjemahan, LP3ES.
- Karianga, Hendra. 2011. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: PT Alumni.
- Katz, Ellen. 2004. Transparency in government-how American citizens influence public policy. *Journal of accountancy*, hal 1-2.

- Kaunang, dkk., 2016. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah: Studi Pada Kota Manado. *Jurnal berkala ilmiah efisiensi*, Vol.16 no 2.
- Ketut, Ni Juni Kalmi Dewi, Dkk. 2015. Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Ditingkat Dadia.
- Maani, Dt K. 2009. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik. *Demokrasi*, 8(1): 47-60.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta. , 2004. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit ANDI, Jakarta.
- Mariska, S dan Dewi Novia Citra. 2018. Analisis Penerapan System Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada Pemerintahan Kota Periaman. *Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan)*, 3(1): 63-70
- Mayasari, P., R. 2012. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik dan Prinsip Value For Money Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Jurnal Kompetitif*, 1(1): 101- 113.
- Mulyono. 2006. Audit Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Nasihatun, Lina Nafidah Dan Mawar Suryaningtyas. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Noviades, Dhils. 2015. Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Pamungkas, R., A., Bambang, H. 2016. Analisis Implementasi Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Pada Lembaga Swadaya Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 4(1): 1-19.
- Pradana, Bumi, Y., P. 2014. Transparansi Birokrasi dalam Pengelolaan APBD di Kota Kupang. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 18(2): 185- 201.
- Raharja, Mega, dkk., 2016. Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Public (Jap)*, 3(1): 111-117.
- Rahmah, Nur Athiyah. 2016. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pengelola Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Kota Palu. *Jurnal Katalogis*, 4(9): 17-28.

- Republik Indonesia. Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkup Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Informasi Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. Permendagri 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006.
- Republik Indonesia. Permendagri Nomor 910/1867/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Scott, William R. 1997. *Financial accounting theory, 2nd Edition*. Canada Inc. Prentices Hall.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Cetakan ke-21*, Bandung: Alfabeta
- Syamsinar. 2016. *Penerapan Prinsip-prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda*.
- Undang-Undang No. 23 tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah.
- Yatminiwati. 2018. Analisis perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. *Jurnal ilmiah ilmu akuntansi, keuangan dan pajak*, 2(1): 48-55.